

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERDESAAN (PPIP) DI DESA GUNUNG KESIANGAN  
KECAMATAN BENAI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**JOYESI NOPITA**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas,  
Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.  
email: [Joyesi88@gmail.com](mailto:Joyesi88@gmail.com)

***ABSTRACT***

*This research was conducted in Gunung Kesiangan Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the Implementation of the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) in Gunung Kesiangan Village, Benai District, Kuantan Singingi District. The formulation of the problem in this study is How the Implementation of the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) in Gunung Kesiangan Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. In this study taken as informants were the Village Head, Village Secretary, Village Device Chairperson of the RT / RW, the Chairperson of Youth, Community Leaders and Community members who knew clearly the Implementation of the Rural Infrastructure Development Program (PPIP). Data analysis used is Qualitative Descriptive, namely data analysis with Milles and Hubberman method with data analysis method with interactive model, namely by steps of reducing data, presenting data, concluding and verifying. The efforts of the village head in carrying out the preparation of resources, units and methods have run maximally where the village head has increased the professionalism of his subordinates by participating in the management of funds for infrastructure development through the PPIP program. The efforts of the village head along with the tools to involve the community in the planning stage have not run optimally because the community's awareness to attend village meetings is still low. At the implementation stage, the community has also been involved in the form of mutual cooperation and becoming workers in infrastructure projects, but not all residents want to participate. Not many people are involved in supervising the results of village infrastructure development because the planning and implementation of their participation is very low. In carrying out evaluation of development results it turns out that the community members have not been directly involved due to community participation in the planning, implementation and supervision of village infrastructure development. maximum.*

**Keywords: Implementation of Rural Infrastructure Development Program**

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini diambil sebagai informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua RT/RW, Ketua Pemuda, Tokoh Masyarakat dan warga Masyarakat yang mengetahui secara jelas Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Analisis data yang digunakan dalam Deskriptif Kualitatif yaitu analisis data dengan metode Milles dan Hubberman dengan metode analisis data dengan model interkatif, yaitu dengan langkah-langkah mereduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi. Upaya kepala desa dalam melaksanakan penyiapan sumber daya, unit dan metode sudah berjalan dengan maksimal dimana kepala desa telah meningkatkan profesionalitas anak buahnya dengan mengikuti acara pengelolaan dana pembangunan infrastruktur melalui program PPIP. Upaya Kepala desa beserta perangkat untuk melibatkan warga dalam tahap perencanaan, belum berjalan dengan maksimal karena kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat desa masih rendah. Pada tahap pelaksanaan masyarakat juga sudah dilibatkan dalam bentuk gotong royong dan menjadi pekerja pada proyek infrastruktur, namun tidak seluruh warga mau ikut berpartisipasi. Masyarakat tidak banyak yang terlibat dalam pengawasan hasil pembangunan infrastruktur desa karena dari perencanaan dan pelaksanaan partisipasinya sangat rendah. Dalam melaksanakan evaluasi hasil pembangunan ternyata warga masyarakat juga belum terlibat secara langsung dikarenakan partisipasi warga masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil pembangunan infrastruktur desa juga belum maksimal.*

**Kata Kunci : Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan**

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab 1 Pasal 1 ayat 8 telah menjelaskan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam proses Pembangunan Desa meliputi tahap meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud harus mengedepankan unsur dan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Hal ini dilakukan adalah untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial serta persatuan masyarakat. Dalam Pembangunan Infrastruktur di desa yang menjadi ruang lingkupnya adalah :

- a. Pembangunan Infrastruktur bidang transportasi (jalan, jembatan, tambatan perahu).
- b. Pembangunan Infrastruktur bidang produksi pertanian (irigasi, embung desa).
- c. Pembangunan infrastruktur bidang pemenuhan kebutuhan dasar (penyediaan air minum, MCK dan sanitase perdesaan).

Pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan desa karena di berbagai pelosok tanah air masih terdapat ribuan daerah pedesaan yang sangat timpang keberadaan infrastrukturnya jika dibandingkan dengan kota yang memiliki fasilitas lengkap. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional.

Dalam rangka mensukseskan pembangunan infrastruktur di desa, maka pemerintahan desa khususnya seorang kepala desa, disamping sebagai kepala pemerintahan yang memiliki wewenang tertinggi di desa, juga harus berperan sebagai komunikator dan motivator dalam usaha mempertinggi partisipasi masyarakat demi mensukseskan pembangunan desa, sehingga tujuan dari pada pembangunan desa tersebut dapat tercapai dengan baik. Partisipasif aktif masyarakat juga sangat penting dalam proses pembangunan, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan hasil pembangunan.

Perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 tahun 2010 tentang perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kawasan pedesaan dengan dasar hukum Undang-Undang No.53 Tahun 1999, Undang-Undang No.10 Tahun 2004, Undang-Undang No.25 Tahun 2004; Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Undang-Undang No.33 Tahun 2004; Undang-Undang No.26 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.51 Tahun 2007.

Implementasi Perda Bupati Kuantan Singingi tersebut adalah melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang di kururkan oleh pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berupa Anggaran Dana Desa (ADD) setelah masing-masing desa dapat menyelesaikan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu desa yang mendapatkan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sehingga Kepala Desa beserta staf pengelolaan keuangan desa harus mampu

mencari cara bagaimana teknik pengelolaan yang baik sehingga perencanaan pengelolaan keuangan guna untuk pembangunan infrastruktur dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran untuk kelengkapan sarana dan prasarana dilingkungan masyarakat.

Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Gunung Kesiangan belum dapat terlaksana secara maksimal, hal ini terbukti masih ada tiga item di tahun 2015 dan satu item tahun 2017 yang tidak dibangun sebagaimana mestinya atau tidak terealisasi serta pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi masalah dan sangat penting untuk diperhatikan adalah ada Infrastruktur yang sudah dibangun namun kategorinya kurang layak untuk dimanfaatkan dan masih banyaknya pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi sementara keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ini harus diperhatikan untuk keberlangsungan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) supaya desa Gunung Kesiangan tersebut menjadi lebih baik dan menjadi panutan bagi desa-desa lain. Pemerintahan Desa selaku badan yang bertanggung jawab harus merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dengan mengikutsertakan atau melibatkan warga masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam PPIP tersebut.

Melihat kondisi ini tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan yang tentunya memerlukan jawaban, hal ini akan terjawab apabila dilakukan penelitian lebih mendalam tentang kendala atau hambatan dalam implementasi program PPIP di Desa Gunung Kesiangan. Melihat Permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.**

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Teori Administrasi Negara**

Administrasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua pengertian administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, kegiatan menyusun keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila mana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun secara keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerical work*) merupakan bagian kecil dari administrasi. (soewarno:1994). Selanjutnya administrasi dalam arti luas berasal dari kata *administration* (bahasa inggris).

#### **2.1.2 Teori Dasar Hukum PPIP**

Sebagai sebuah program pemerintah, PPIP tentu memiliki kekuatan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 12/PMK.05/2012 tentang penyusunan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran lanjutan program/kegiatan nasional pemberdayaan masyarakat mandiri tahun anggaran 2012 dengan sumber dana dari sisa anggaran program /kegiatan nasional pemberdayaan masyarakat mandiri tahun anggaran 2011 pada pasal (5) yang berbunyi : PNPM Mandiri

Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: Program Pengembangan infrastruktur Perdesaan (PPIP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025 upaya mewujudkan penanggulangan kemiskinan di perdesaan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program, antara lain: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, *Rural Infrastructure Support* (RISP) tahun 2006, serta program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sejak tahun 2007 sampai sekarang.

### **2.1.3 Teori Implementasi**

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Cleaves yang dikutip (dalam wahab 2008; 187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik, keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

### **2.1.4 Teori Proses Implementasi Kebijakan**

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal secara rutin.

### **2.1.5 Teori Program**

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Menurut Dye (1992), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai "*Whatever government choose to do or not to do*". Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

### **2.1.6 Teori Pembangunan**

Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Untuk memungkingkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik karena stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas negara tersebut setiap tahunnya (Budiman, 1995:8)

### **2.1.7 Teori Infrastruktur**

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

### **2.1.8 Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)**

Pembangunan Desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia yang bermukim di perdesaan, dengan demikian merupakan pula titik sentral daripada pembangunan Nasional. Semua jenis pembangunan, baik program sektoral, program regional maupun program khusus (Inpres), semuanya difokuskan ke arah perdesaan. Daerah perdesaan merupakan tumpuan dari segala kegiatan pembangunan, apakah itu proyek besar ataukah proyek kecil, kesemuanya itu pada dasarnya diarahkan dan berlokasi di daerah perdesaan, Karena itu pula pembangunan desa tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak saja tanpa koordinasi, kerjasama dan terintegrasi dengan semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat, dari pusat sampai ke daerah dan desa-desa (Departemen Penerangan RI, 1990 : 14)

Pendekatan pembangunan *top-down* masih diperlukan, khususnya untuk program-program pembangunan yang sifatnya vital atau yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau yang merupakan pelayanan antar wilayah, misalnya pembangunan pelabuhan laut, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan jalan arteri primer, perumahan rakyat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan lainnya, karena program pembangunan perdesaan yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pendekatan pembangunan desa seharusnya bersifat *bottom-up* yang diperkuat dengan pendekatan partisipatif.

Tujuan implementasi PIIP adalah :

#### **1) Kepentingan Masyarakat Miskin**

Kepentingan masyarakat miskin yang diamati melalui empat fenomena yaitu :

- (a) Keberpihakan program PIIP kepada orang miskin Pelaksanaan pendekatan keberpihakan kepada orang miskin dalam program PIIP ini terlihat pada saat

pelaksanaannya melibatkan secara langsung masyarakat miskin dan kaum perempuan, baik dalam proses sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat hingga pelaksanaan pembangunan fisik berupa jalan beton di dusun ronge.

- (b) Meningkatkan keeratan gotong royong masyarakat dalam program PPIP di dalam meningkatkan keeratan gotong royong masyarakat Desa dalam program PPIP sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari saling bekerjasamanya warga masyarakat membangun jalan beton dengan rasa antusias karena warga masyarakat menilai kebermanfaatannya yang akan mereka terima mulai dari penyerapan tenaga kerja dan kemudahan akses mobilitas yang diterima.

Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program PPIP, di dalam meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan infrastruktur perdesaan sudah cukup baik dengan kehadiran dalam musyawarah rencana pembangunan desa untuk menentukan jenis kegiatan pembangunan untuk pembangunan program PPIP.

Penguatan kapasitas ke-lembagaan melalui program PPIP. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan yang dalam hal ini adalah organisasi masyarakat setempat (OMS) belum dicapai secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh tidak diberikannya pelatihan kepada para anggota organisasi untuk keberlangsungan organisasi tingkat bawah dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur perdesaan.

## 2) Tipe Manfaat

Manfaat yang diberikan program pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Gunung Kesiangan tidak hanya pada bidang ekonomi. Hal ini mendorong masyarakat untuk berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat luas. Seperti pada bidang ekonomi dengan peralihan mata pencaharian masyarakat dari pertanian ke wirausaha merupakan implikasi dari adanya arus informasi yang masuk sehingga memunculkan inovasi dan semangat lebih untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat.

## 3) Derajat perubahan yang ingin dicapai

Derajat perubahan yang dikehendaki program PPIP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan mampu menyerap tenaga kerja dan dengan kemudahan akses tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan lainnya sehingga menarik antusias masyarakat, serta dampak program PPIP yang sudah mulai terlihat dengan semakin meningkatnya harga jual hasil pertanian masyarakat Desa Gunung Kesiangan, masyarakat memanfaatkan kemudahan akses untuk berwirausaha dengan semakin mudahnya menjangkau pusat perekonomian.

## 4) Letak Pengambil Keputusan

Aktor kebijakan PPIP terbagi kedalam dua bagian. Pertama, *top down* yang melibatkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Pemerintah yang bertanggung jawab atas program PPIP. Kedua, *bottom up* yang meliputi pemilihan kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan dalam program PPIP. koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pelaksana dilakukan melalui dua cara, yaitu secara rutin per *tri wulan*, dan kondisional terutama pada saat pelaksanaan pembangunan.

Di dalam teori Merilee S. Grindle variabel konten letak pengambilan keputusan ini berkaitan dengan variabel konteks kekuasaan kepentingan. Pengambilan keputusan program PPIP terdapat dalam kebijakan pusat yaitu secara nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, namun dalam

pelaksanaannya agar tercipta *sense of belonging* masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan, maka program PPIP dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan penerima, pelaksana, dan pemanfaat program adalah masyarakat perdesaan.

### 5) Pelaksana Program

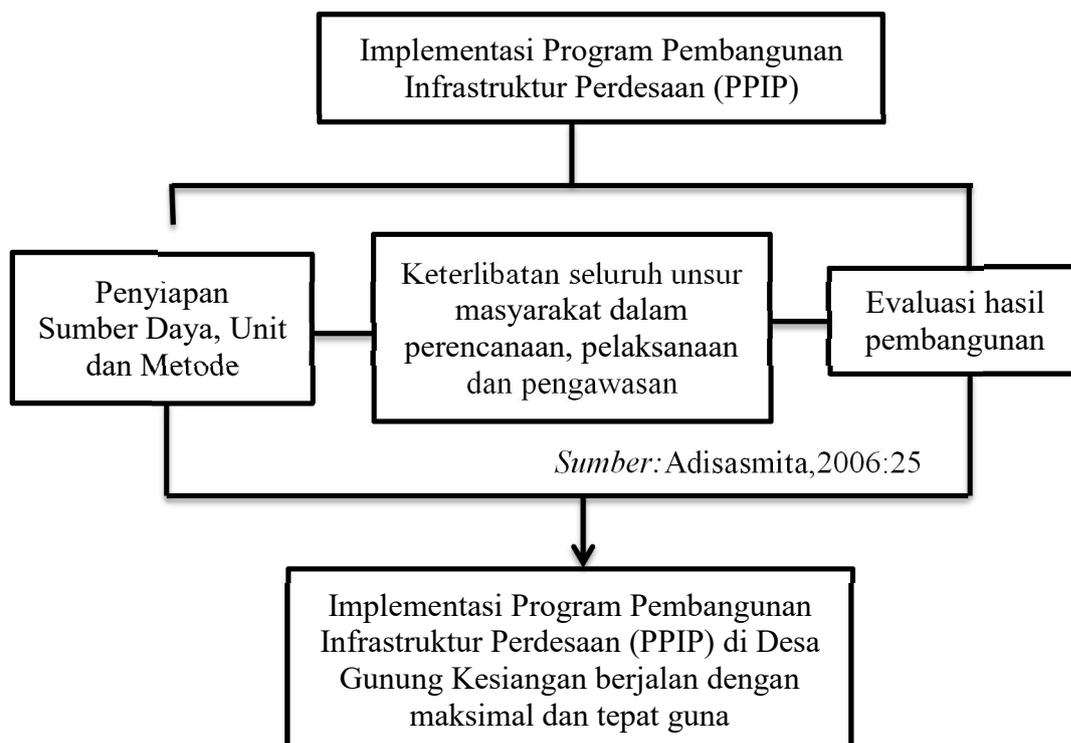
Program PPIP memiliki kapasitas pada bidangnya secara aktif, berkualitas, berkeahlian dan berdedikasi cukup tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan telah mendukung keberhasilan implementasi program PPIP Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksana program PPIP yang tergabung dalam tim pelaksana kabupaten dan fasilitator masyarakat untuk menjadi pelaksana di setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dibagi sesuai dengan kebutuhan desa yang mendapatkan program PPIP. Fasilitator Masyarakat (FM) yang mendampingi pada saat perencanaan pembangunan memiliki bidang keahlian pada bidang teknik dan ekonomi, hal ini dilakukan untuk merencanakan Rancangan

Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah dalam Septyasa (2013:6) adalah:

1. Partisipasi buah pikiran
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, bantuan untuk orang lain dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban

### 2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun gambar Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber: Olahan Penelitian 2019

### 2.3 Definisi Operasional

Untuk memudahkan analisis data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya:

- a. Pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.
- b. Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa harus melaksanakan penyiapan sumber daya, unit dan metode yaitu melibatkan tenaga profesional (Kaur Pembangunan) dan operator desa untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta strategi dan metode yang akan digunakan.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan, Kepala Desa harus melibatkan berbagai unsur di masyarakat yaitu Pemerintahan Desa, BPD dan masyarakat desa dalam hal perencanaan (*Planning*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan hasil pembangunan (*Controlling*)
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal secara rutin, Kepala Desa harus membuka ruang pelayanan pengaduan masyarakat untuk segala bentuk kekurangan dan kelemahan infrastruktur yang telah di bangun dengan tujuan agar segera memperbaiki infrastruktur belum bisa dimanfaatkan.

### 2.4 Operasional Variabel

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian**

No	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai	Penyiapan	Kepala Desa Membentuk Panitia Pengelola PKPKD/ PTPKD	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			Kepala Desa mengundang warga untuk rapat perencanaan pembangunan Infrastruktur	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			Kepala Desa Mensurvey Lokasi tempat pembangunan infrastruktur	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

			Kepala Desa meminta tidak ada ganti rugi kepada warga	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		Keterlibatan	Meminta aspirasi masyarakat dalam memilih infrastruktur yang akan bangun melalui Musrenbangdes	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			Mengajak masyarakat untuk secara sukarela bergotong-royong	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			Masyarakat langsung dilibatkan dalam pembangunan proyek infrastruktur sebagai pekerja dan digaji	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan hasil pembangunan infrastruktur	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		Evaluasi	Dibukanya posko pengaduan hasil pembangunan infrastruktur yang belum bisa dimanfaatkan dan tidak dibangun sesuai anggaran	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
			Masyarakat melaporkan hasil pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai	Teraksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

Sumber : Olahan Penelitian 2019

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif. Dimana metode penelitian ini terdiri atas lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, sumber data, penentuan informan teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, selanjutnya alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif, dan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

#### 3.2 Informan

Informan yang akan diwawancarai dan menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Staff Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai.

#### Tabel 3.1 Key Informan Penelitian

No	Nama Informan	Volume	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang	1
2	Sekretaris Desa	1 orang	1
3	Kaur Umum/Bendahara	1 orang	1
4	Kaur Pembangunan	1 orang	1
5	Kaur Pemerintahan	1 orang	1
6	Kepala Dusun	2 orang	2
7	Ketua RT dan RW	2 orang	2
8	Ketua Pemuda	1 orang	1
9	Tokoh Masyarakat	2 orang	2
10	Masyarakat	2 orang	2
<b>Jumlah</b>			<b>14</b>

### 3.3 Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memperoleh data yaitu dari:

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang dikumpulkan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian lalu melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai.

#### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang penulis peroleh dari pihak instansi berupa laporan dan catatan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan. Data sekunder diperoleh yaitu dengan membaca buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai literatur-literatur yang lainnya yang memiliki hubungan dengan tulisan ini seperti jurnal-jurnal yang ada di internet yang terkait masalah PPIP

### 3.4 Fokus Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam atau sosial (Anwar Sanusi, 2011:67). Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus yaitu pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi; kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) atau informasi baru yang diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan Moleong (2010:93-94).

### 3.5 Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memilih lokasi di desa ini dikarenakan penulis melihat bahwa Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan :

#### 3.6.1 Metode Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung dengan turun atau terlibat secara langsung dilokasi penelitian.

### 3.6.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur.

### 3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Dimana dalam hal ini penulis melakukan metode dokumentasi agar mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan, yaitu data implementasi PPIP desa Gunung Kesiangan dan dokumentasi dengan informan yang menjadi sumber data informasi.

## 3.7 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008: 246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Milles dan Hubberman dalam Sugiyono (2008: 246), mengungkapkan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

### a. Reduksi Data

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data ini data-data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian akan diorganisir ke dalam sebuah “matriks analisis data”, yang meliputi unsur-unsur fokus penelitian, substansi data, katagori data, dan *meaning* (pemaknaan)

### b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

### c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data empiris hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang disusun dalam bab tinjauan pustaka usul penelitian ini, ataupun teori-teori lain yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan ditemukan kemudian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang pucuk pimpinan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

### **5.2.1 Penyiapan Sumber Daya, Unit dan Metode**

Sebagai kepala desa harus mampu menentukan wilayah atau lahan yang akan dijadikan sebagai wadah pembangunan infrastruktur desa, seperti menentukan jalan mana yang akan diseminisasi serta berapa meter panjang jalan yang bisa diseminisasi, kemudian dalam menentukan metode pembangunan infrastruktur, kepala desa harus mampu melibatkan tenaga profesional dalam hal ini adalah Kaur Pembangunan yang akan menyusun anggaran dengan operator desa untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta strategi dan metode pembiayaan pembangunan yang akan digunakan dan jangka waktu pengerjaan.

### **5.2.2 Keterlibatan seluruh masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil pembangunan infrastruktur desa.**

Keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan infrastruktur disebut dengan partisipasi atau keikutsertaan sebagai warga masyarakat. Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan seseorang. Sangat jelas bahwa masyarakat di pedesaan hendaknya ikut serta dalam setiap program pembangunan desa. Keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk uang (benda), pikiran (ide atau gagasan), maupun dalam bentuk tenaga (gotong royong).

### **5.2.3 Evaluasi hasil Pembangunan**

Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Secara umum evaluasi adalah proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan atau kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

## **5. KESIMPULAN**

Dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian ini, dapat kita simpulkan bahwa: Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai sebagai berikut :

1. Upaya kepala desa dalam melaksanakan penyiapan sumber daya, unit dan metode sudah berjalan dengan maksimal dimana kepala desa telah meningkatkan profesionalitas anak buahnya dengan mengikuti acara pengelolaan dana pembangunan infrastruktur melalui program PPIP.
2. Upaya Kepala desa beserta perangkat untuk melibatkan warga dalam tahap perencanaan, belum berjalan dengan maksimal karena kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat desa masih rendah. Pada tahap pelaksanaan masyarakat juga sudah dilibatkan dalam bentuk gotong royong dan menjadi pekerja pada proyek infrastruktur, namun tidak seluruh warga mau ikut berpartisipasi. Masyarakat tidak banyak yang terlibat dalam pengawasan hasil pembangunan infrastruktur desa karena dari perencanaan dan pelaksanaan partisipasinya sangat rendah.
3. Dalam melaksanakan evaluasi hasil pembangunan ternyata warga masyarakat juga belum terlibat secara langsung dikarenakan partisipasi warga masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil pembangunan infrastruktur desa juga belum maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Atas rahmad dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIPP) DI DESA GUNUNG KESIANGAN KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**“Ucapan shalawat dan salam “allahuma salli’ala Muhammad wa’ala ali Muhammad” semoga allah limpahkan kepada junjungan alamnabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)
2. Bapak **Zul Ammar, S.E, MM** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak **Desriadi, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara beserta seluruh stafnya sekaligus sebagai pembimbing II bagi peneliti dalam menyelesaikan proposal ini.
4. Bapak **Sahri Muharram, S.Sos, M.Si** selaku pembimbing I untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh Staff Pengajar, Bapak /Ibu Dosen beserta Karyawan/TU Program Studi ADM Negara Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)
6. Bapak **Umar Usman** selaku Kepala Desa Gunung Kesiangan Beserta Bapak **Rigun Naden** selaku Sekretaris Desa yang memberikan kemudahan dalam memperoleh data.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Raja Minsan** (Almarhum) dan ibunda **Asma Neti** yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis sampai saat ini.
8. Saudaraku (Kakak-adik) **Raja Alpi Susanto, Raja Sarni, Joasriati, Joana Yanti, Joelni Riza & Jonafsi Ardila** yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan , moril dan materi.
9. Seluruh Keluarga Besar yang telah ikut membantu penulis berupa materi maupun immateri selama perkuliahan berlangsung.
10. Kepada rekan-rekan yang seperjuangan Prodi Administrasi Negara yang telah turut memberikan motivasi kepada Penulis dan seluruh orang yang telah berjasa dan turut serta dalam membantu penyelesaian perkuliahan ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, semoga diberikan pahala yang setimpal oleh Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua....amiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Afifuddin, 2012. *Pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta

- Arikunto, Suharsimi & Cepi Syafruddin Abdul Jabar, 2004. *Evaluasi program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Handayani, Risma. 2014. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Inu Kencana Syafie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyana, Deddy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi 27. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sondang P. Siagian, 2008. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sukardi, H.M. 2008. *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo